

Trade-off Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Marihot Nasution³², Hafidz Huzaifah³³

Abstract

This study examined the Phillips curve theory and Okun's Law in Indonesia, whether there is an agreement on two theories to the real conditions that occur in the field. Some previous studies found that unemployment has a unidirectional relationship with inflation where it is not in line with the Phillips curve theory. Similarly, the relationship between economic growth and unemployment. Earlier studies suggested that in the short term, there is a negative relationship between unemployment and economic growth. This condition is not in accordance with Okun's law. The purpose of this study was to determine the relationship between inflation, economic growth and the unemployment rate. The study will be conducted using the Granger Causality Test to look at the causal relationships between variables.

Keywords: *Phillips curve, Okun's Law, inflation, economic growth and the unemployment rate*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian terutama untuk mengetahui hasil pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Seiring dengan hal tersebut, tujuan negara membangun adalah kesejahteraan rakyat, maka masalah pengangguran yang tinggi merupakan kondisi yang sangat tidak dikehendaki oleh suatu negara dimanapun.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat, karena kontribusi penduduk yang bekerja dalam menghasilkan barang dan jasa akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih baik. Hukum Okun (Okun's Law) menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Adanya

³² Lembaga: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: marihot.nasution@gmail.com

³³ Lembaga: Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan. Alamat: Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270. Alamat email penulis: hafidz_huzaifah@yahoo.com

pertumbuhan dalam *Gross Domestic Product* (GDP) yang mendekati 3 % akan mengurangi pengangguran sebesar 1% (Prachowny, 1993).

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, inflasi juga memiliki hubungan erat dengan tingkat pengangguran. Terdapat hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Hubungan tersebut pertama kali dilaporkan oleh A. W. Phillips pada tahun 1958-dan dinyatakan sebagai kurva Phillips. Intuisi sederhana di balik trade-off ini adalah bahwa ketika tingkat pengangguran jatuh, pekerja diberdayakan untuk mendorong upah yang lebih tinggi. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan biaya upah yang lebih tinggi bagi para konsumen, sehingga memunculkan kondisi peningkatan harga dan penumpukan inflasi dalam perekonomian. Trade-off yang disarankan oleh kurva Phillips menyiratkan bahwa para pembuat kebijakan dapat menargetkan tingkat rendah inflasi atau pengangguran yang rendah, tetapi tidak keduanya (Vasudevan, 2006³⁴).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengangkat hal terkait fenomena Kurva Phillips dan Hukum Okun di Indonesia. Studi tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pengangguran dan tingkat inflasi dan juga mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran.

Fenomena menarik di Indonesia mengenai pengangguran dan inflasi adalah tidak terdapatnya hubungan yang berlawanan antara keduanya. Kondisi tersebut terutama terjadi di tahun 2005 dimana ketika angka pengangguran tinggi juga diikuti dengan kenaikan inflasi³⁵. Hal ini akan menjadi bertentangan dengan teori Kurva Phillips yang menyatakan bahwa pengangguran yang tinggi cenderung mengurangi inflasi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Hukum Okun menyatakan bahwa setiap penurunan pengangguran 1% akan diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

³⁴ Ramaa Vasudevan, Ask Dr. Dollar <http://www.dollarsandsense.org/archives/2006/0906drdollar.html>

³⁵ Gambar 2. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Tahun 1986-2015

C. Tujuan Analisis

Tujuan analisis ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran melalui uji teori Kurva Phillips.
2. Untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan tingkat pengangguran melalui uji teori Hukum Okun.
3. Untuk mengetahui hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran apakah terjadi hubungan dua arah, searah atau bahkan tidak berhubungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Pengertian inflasi secara umum diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus selama dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu diketahui bahwa: (1) inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang-barang dan jasa secara terus menerus, (2) kenaikan harga barang-barang ini tidak berarti harus naik dengan persentase yang sama, namun terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus menerus (dalam dimensi waktu tertentu), (3) jika kenaikan harga hanya sekali saja dan bersifat sementara atau secara temporer (sekali pun dalam persentase yang besar) tetapi tidak berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi (Prasetyo, 2009).

Makro ekonomi suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Kondisi pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong

peningkatan keresahan sosial dan kriminal yang dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Blanchard, 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Alghofari, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan suatu negara, khususnya dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

B. Kurva Phillips

Hubungan terbalik (*trade-off*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai *stagflasi* (Dornbusch, 2008).

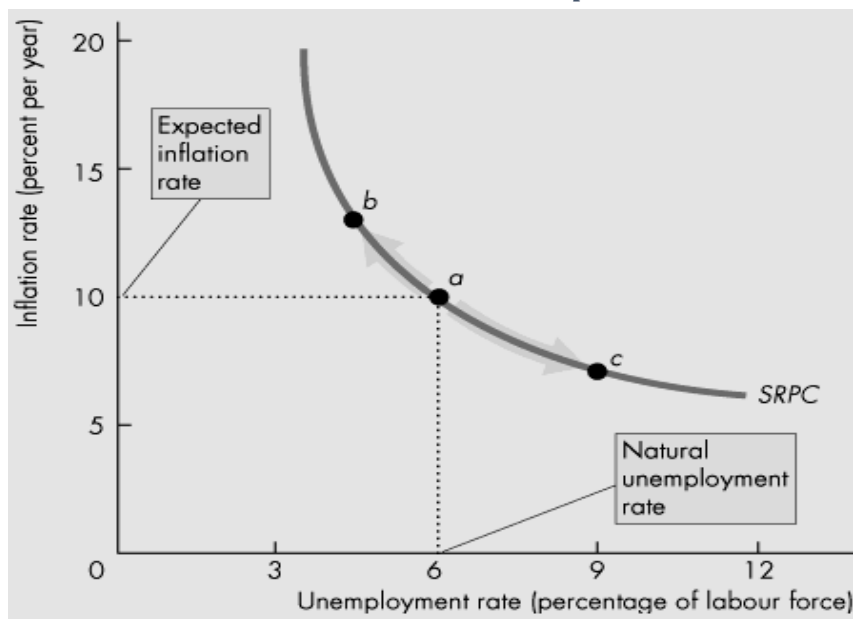
Kurva tersebut menyarankan bahwa perubahan tingkat pengangguran memiliki efek langsung dan dapat diprediksi pada tingkat inflasi harga. Penjelasan yang diterima selama tahun 1960-an adalah bahwa stimulus fiskal, dan peningkatan permintaan agregat, akan memicu beberapa tanggapan berikut:

1. Peningkatan permintaan tenaga kerja sebagai belanja pemerintah menghasilkan pertumbuhan.
2. Kolam pengangguran akan jatuh.

3. Perusahaan harus bersaing untuk pekerja yang lebih sedikit dengan menaikkan upah nominal.
4. Pekerja memiliki daya tawar yang lebih besar untuk mencari kenaikan upah nominal.
5. biaya upah akan naik.
6. Dihadapkan dengan meningkatnya biaya upah, perusahaan membebankan kenaikan biaya ini di harga yang lebih tinggi.

Adapun gambar kurva Phillips adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva Philips



A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang (Doornbusch, 2008).

C. Hukum Okun

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran telah dianalisa sebelumnya di tahun 1962 oleh Arthur Melvin Okun yang kemudian hasil analisa tersebut

sering disebut sebagai Hukum Okun. Dari hukum tersebut diamati hubungan antara pengangguran dan kerugian dalam produksi suatu negara secara empiris. Stabilitas dan kegunaan hukum telah diperdebatkan. Hukum Okun lebih akurat disebut "aturan praktis Okun" karena merupakan pengamatan empiris yang berasal dari teori. Hukum Okun merupakan perkiraan karena tidak menguji faktor lain selain tingkat pengangguran yang juga mempengaruhi output misalnya produktivitas. Hukum Okun menyatakan bahwa peningkatan satu poin dalam tingkat pengangguran siklus dikaitkan dengan dua poin persentase pertumbuhan negatif pada GDP riil. Hubungan tersebut bervariasi tergantung pada periode negara dan waktu yang digunakan dalam pengujian.

Teori lainnya, Prachowny (1993) memperkirakan penurunan sekitar 3% dalam output untuk setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran. Namun, ia berpendapat bahwa mayoritas dari perubahan dalam output sebenarnya karena perubahan faktor selain pengangguran, seperti pemanfaatan kapasitas dan jam kerja. Jika faktor-faktor lainnya konstan, maka dapat mengurangi hubungan antara pengangguran dan GDP menjadi sekitar 0,7% untuk setiap perubahan 1% dalam tingkat pengangguran (Prachowny, 1993). Besarnya penurunan tampaknya menurun dari waktu ke waktu di Amerika Serikat. Menurut Abel dan Bernanke (2005), perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun terkini memberikan sekitar penurunan 2% dalam output untuk setiap kenaikan 1% pengangguran.

Sementara itu, di Indonesia, dengan adanya hubungan antara kedua variabel ini dijadikan dasar dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan salah satu sasarannya adalah penurunan jumlah pengangguran. Pemerintah Indonesia berupaya agar pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu mengurangi jumlah pengangguran. Target daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ini dipertegas dalam batang tubuh Undang-Undang APBN di tiap tahunnya (Gambar 1). Komitmen penurunan jumlah pengangguran ini berubah sesuai kondisi ekonomi yang terjadi di tahun berjalan. Di tahun 2011 hingga 2013, dalam UU APBN tercantum bahwa Pemerintah Indonesia mengupayakan agar penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun tersebut berkisar di 400.000-450.000 tenaga kerja dalam setahunnya. Namun di 2014 dan 2015, target penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi tersebut diturunkan menjadi 200.000 di tahun 2014 dan 250.000 tenaga kerja di tahun 2015.

Gambar 2. Target Pemenuhan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

2011	2012	2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2011 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) sampai dengan 12,5% (dua belas koma lima persen); dan Pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 400.000 (empat ratus ribu) tenaga kerja. [Pasal 39 UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4% (enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam koma enam persen). [Pasal 45 UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sebelas koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen). [Pasal 36 UU No. 19 tahun 2012 tentang APBN 2013] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2014 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 200.000 (dua ratus ribu) tenaga kerja; tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,6% (lima koma enam persen) sampai dengan 5,9% (lima koma sembilan persen); dan penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal. [Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN 2014] 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2015 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen); pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,5% (lima koma lima persen) sampai dengan 5,7% (lima koma tujuh persen); dan penurunan Gini Ratio, peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan, dengan tetap mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi, baik eksternal maupun internal. [Pasal 32 UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015]

Sumber: UU APBN 2011-2015, Kementerian Keuangan

III. METODOLOGI ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif melalui uji teori, yaitu penelitian didasarkan pada fakta yang ada kemudian dilakukan uji kesesuaian dengan teori yang ada. Metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Penelitian ini akan menggunakan uji akar unit untuk melihat stasionaritas data. Uji derajat integrasi juga akan dilakukan jika data belum stasioner pada derajat nol, dan yang terakhir adalah menggunakan Uji Granger Causality yang berguna untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel.

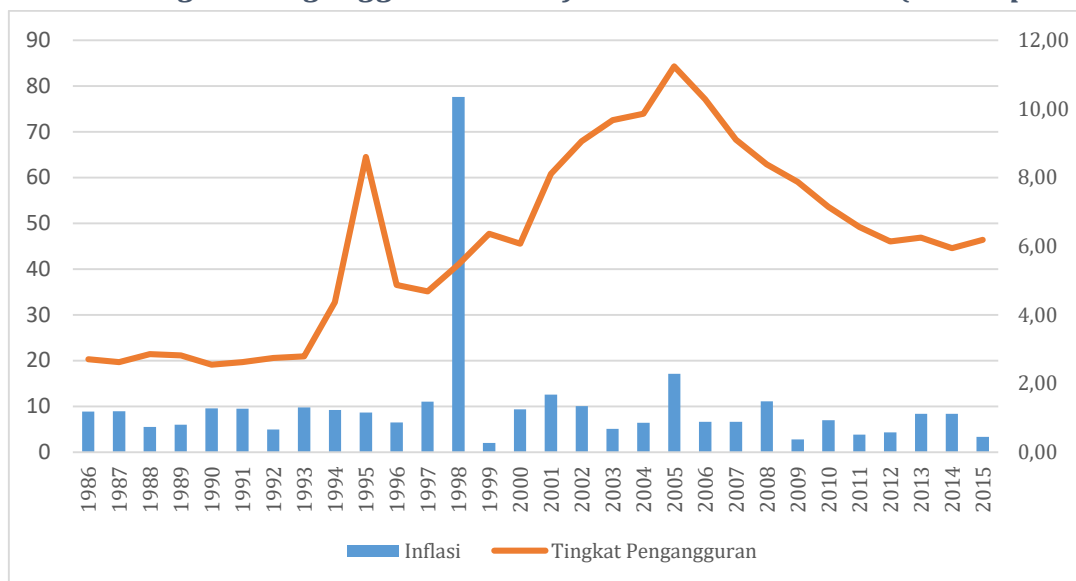
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Inflasi dan Tingkat Pengangguran

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5 persen seperti tampak di gambar 3. Pada tahun 1998 tingkat pengangguran mulai di atas 5%

hingga tahun 2015. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang makin membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi hingga tahun 2005 kemudian mulai menurun hingga tahun 2015.

Gambar 3. Tingkat Pengangguran dan Inflasi Tahun 1986-2015 (dalam persen)



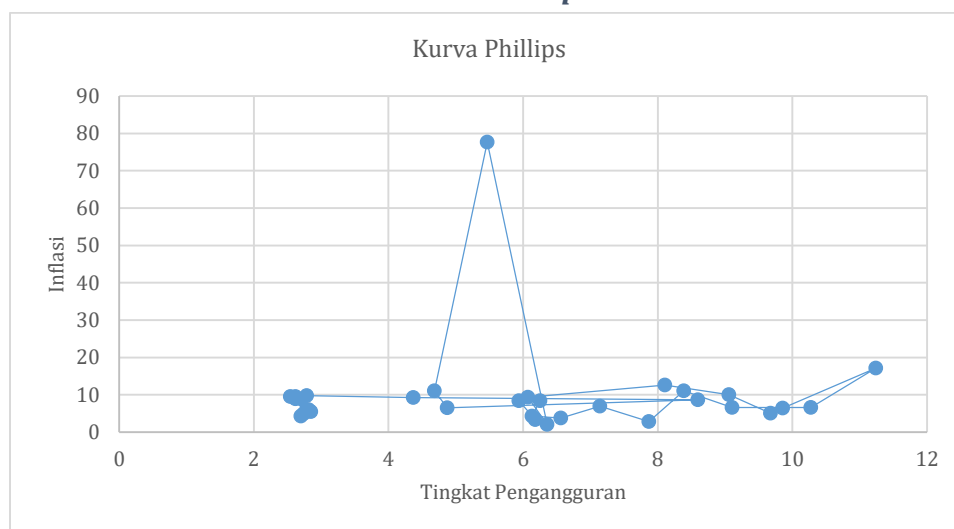
Sumber: BPS, Diolah

Inflasi Indonesia dari tahun 1986 hingga 2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 77,63% dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,01%. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan indikasi awal memburuknya perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian namun dalam jangka panjang kenaikan inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam

negeri. Produksi menjadi berkurang karena sejumlah pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat.

Bentuk kurva Phillips³⁶ memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi/tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Adapun bentuk kurva Phillips Indonesia dengan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Kurva Phillips Indonesia



Sumber: BPS, Diolah

Kurva Philips³⁷ di atas menunjukkan bahwa di Indonesia hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri Amir dengan data inflasi dan pengangguran Indonesia tahun 1980 hingga 2005 yang juga menunjukkan hubungan yang positif antara pengangguran dan inflasi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Oleh

³⁶ Kurva Phillips dibuat dengan membuat plot titik koordinat antara pengangguran dan inflasi

³⁷ Data yang digunakan untuk membuat kurva Phillips di atas adalah data dari tahun 1985 hingga 2015

karena itu, inflasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pengangguran. Adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Kenaikan harga BBM ini pada akhirnya akan meningkatkan harga akibat kelangkaan pasokan dan gangguan distribusi di berbagai daerah. Dengan alasan inilah maka hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dengan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva Phillips. Alasan lainnya adalah bahwa dalam kurva Phillips hanya terjadi dalam jangka pendek tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena pada jangka pendek masih berlaku harga kaku "*sticky price*" sedangkan pada jangka panjang berlaku harga fleksibel. Dengan kata lain pengangguran akan kembali pada tingkat alamiahnya sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran akan positif.

Tiga masalah utama dan mendasar dalam perekonomian Indonesia secara makro ekonomi adalah persoalan ketenagakerjaan atau pengangguran dan inflasi yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan belum berkualitas. Penanggulangan atau kebijakan pada dua masalah ini pun tidak dapat diprioritaskan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu, semuanya bergantung pada kondisi struktural perekonomian³⁸.

Kurva Phillips tidak berlaku di Indonesia karena inflasi di Indonesia tidak disebabkan oleh permintaan agregat melainkan kenaikan harga, misalnya akibat kenaikan BBM. Selain itu kebanyakan perusahaan di Indonesia menerapkan padat modal bukan padat karya, sehingga pertumbuhan lapangan kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Suatu perekonomian negara dikatakan baik jika pada suatu ketika tingkat inflasi dan pengangguran yang terjadi lebih rendah dibanding tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja.

Penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional sesuai pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap penganggur diupayakan memiliki pekerjaan yang artinya produktif dan remuneratif. Untuk itu diperlukan dua kebijakan yaitu kebijakan makro dan mikro. Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain kebijakan moneter terkait uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank

³⁸Dr. Hendri Saparini dalam diskusi dengan pakar tanggal 16 Juli 2014.

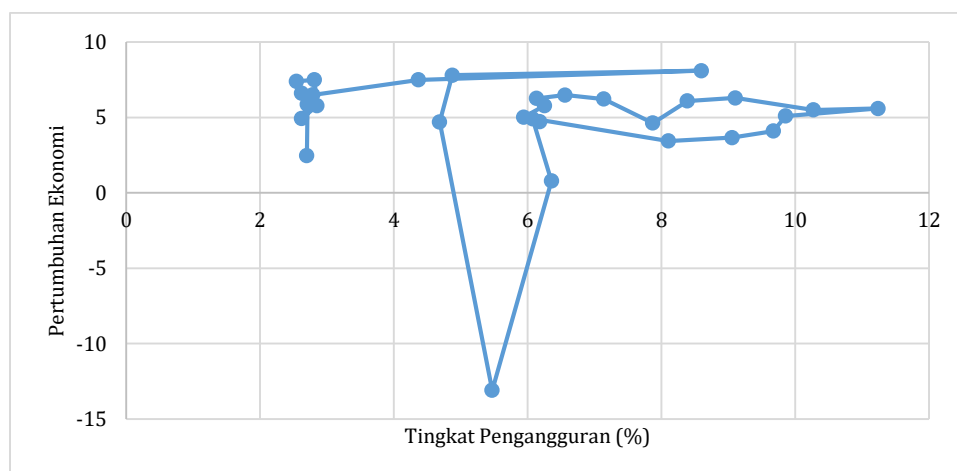
Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya dalam setiap rapat-rapat kabinet harus lebih fokus pada masalah penanggulangan pengangguran. Kebijakan mikro (khusus) yang berkaitan erat dengan penanganan pengangguran antara lain:

- Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
- Segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi.
- Segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok.

B. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia lebih tepat jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Adapun grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran adalah sebagai berikut.

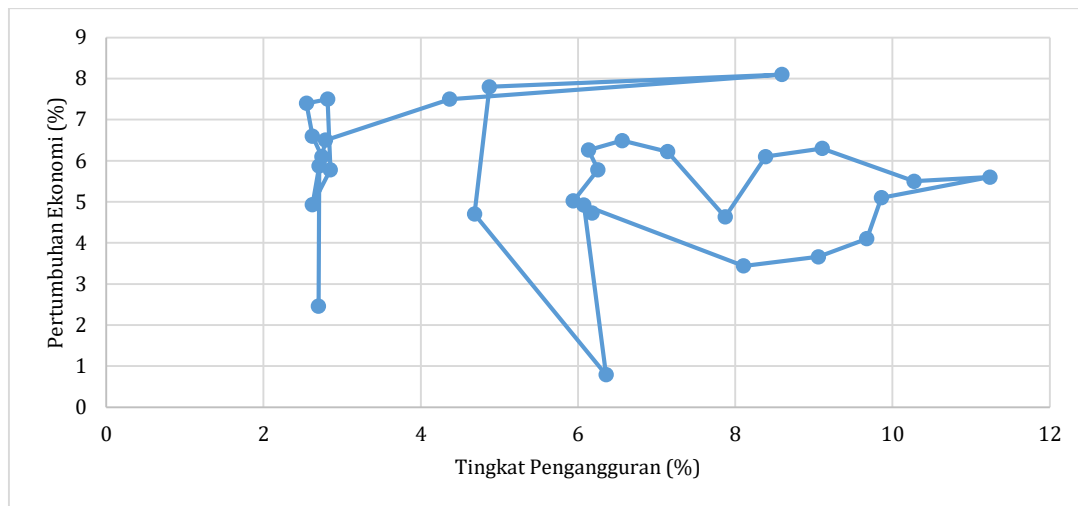
Gambar 5. Kurva Diagram Sebaran Antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2015



Sumber: data diolah

Dengan menggunakan data antara pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti yang digunakan dalam membuat kurva Phillip (data tahun 1998 tidak digunakan karena mempunyai nilai ekstrim) akan dapat digambarkan bagaimana kurva hubungan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran.

Gambar 6. Kurva Diagram Sebaran Antara Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1985-2015 Tanpa Memasukkan Data Tahun 1998



Sumber: data diolah

Dari hasil penggambaran diagram sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan hukum Okun yaitu memiliki hubungan yang negatif, meskipun angka perbandingan yang dihasilkan tidak tepat bahwa setiap penurunan tingkat pertumbuhan 2% akan diikuti kenaikan pengangguran 1%.

C. Kaitan Antara Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Inflasi yang meningkat berdampak pada penurunan investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga yang pada akhirnya akan menurunkan investasi yang kemudian mampu menurunkan kapasitas produksi. Lebih lanjut, kapasitas produksi yang menurun akan menurunkan penyerapan tenaga kerja, disisi lain jumlah tenaga kerja terus bertambah sehingga hal ini mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran.

Pengangguran yang meningkat menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga konsumsi pun menurun. Konsumsi, sebagai salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan menurunnya permintaan agregat konsumsi akan berakibat

menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Ketika anggaran guna belanja atau konsumsi turun, namun pemerintah ingin mempertahankan anggaran belanja yang sesuai maka akan dilakukan pendanaan baru yang dapat berasal dari pencetakan uang. Jika jumlah uang yang beredar semakin banyak maka akan berdampak pada meningkatnya inflasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua arah maka dilakukan uji kausalitas sebagai berikut.

D. Uji Stasioner (Akar Unit)

Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata dan variannya untuk berbagai lag yang berbeda nilainya adalah konstan sepanjang waktu (Gujarati, 2003).

Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtun waktu perlu dilakukan guna mengetahui keabsahan kestasioneran data yang akan dianalisis. Data yang digunakan dalam model harus bersifat stasioner (tidak memiliki akar unit) yaitu data yang memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan data derajat nol dan tingkat lag 7 sebagai lag optimal karena menghasilkan R adjusted tertinggi yaitu sebesar 0,932629, diperoleh bahwa terdapat data yang tidak stasioner seperti di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Akar Unit dengan Tingkat Lag Optimal 7

Root	Modulus
1.614867	1.614867
-0.841091 + 0.585024i	1.024542
-0.841091 - 0.585024i	1.024542
-0.308512 - 0.944321i	0.993439
-0.308512 + 0.944321i	0.993439
0.957717 - 0.226924i	0.984234
0.957717 + 0.226924i	0.984234
0.419304 - 0.872629i	0.968141
0.419304 + 0.872629i	0.968141
-0.529557 + 0.805359i	0.963864

-0.529557 - 0.805359i	0.963864
-0.875872 + 0.401080i	0.963337
-0.875872 - 0.401080i	0.963337
-0.021716 + 0.957169i	0.957415
-0.021716 - 0.957169i	0.957415
0.746865 + 0.582409i	0.947105
0.746865 - 0.582409i	0.947105
-0.940075	0.940075
0.482916 + 0.490340i	0.688216
0.482916 - 0.490340i	0.688216
0.016732	0.016732
Warning: At least one root outside the unit circle.	
VAR does not satisfy the stability condition.	

Sumber: Data diolah.

Pendekatan VAR sangat sensitif terhadap jumlah lag data yang digunakan, maka perlu ditentukan jumlah lag yang optimal. Penentuan panjang lag dimanfaatkan untuk mengetahui lamanya periode keterpengaruhan suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap variabel endogen lainnya (Rosadi, 2012). Penentuan lag optimal dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) dan Schwarz Information Criterion (SC). Hasil VAR Lag Order Selection secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari hasil uji penentuan lag, diperoleh lag optimal yang digunakan adalah lag 5 karena menghasilkan AIC terendah.

Tabel 2. Pengujian Penentuan Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-206.9329	NA	3948.664	16.79464	16.94090	16.83520
1	-190.5734	27.48403	2209.587	16.20587	16.79093*	16.36814
2	-181.1953	13.50446	2226.276	16.17562	17.19948	16.45960
3	-162.2100	22.78237*	1102.199*	15.37680	16.83945	15.78248
4	-155.8143	6.139844	1651.689	15.58515	17.48659	16.11253
5	-140.8715	10.75882	1487.917	15.10972*	17.44996	15.75880*
* indicates lag order selected by the criterion						

Sumber: Data diolah

Dengan adanya data yang tidak stasioner pada derajat nol maka pengujian data dilanjutkan pada tingkat *first difference* dengan tingkat lag optimal adalah lag 5 dengan nilai R-adjusted 0,855839.

Tabel 3. Hasil Uji Akar Unit dengan Tingkat Lag Optimal 5

Root	Modulus
-0.166206 - 0.905102i	0.920236
-0.166206 + 0.905102i	0.920236
-0.615454 - 0.672637i	0.911715
-0.615454 + 0.672637i	0.911715
0.323211 - 0.849123i	0.908557
0.323211 + 0.849123i	0.908557
-0.743630 - 0.504556i	0.898645
-0.743630 + 0.504556i	0.898645
-0.890525	0.890525
0.840444 - 0.235120i	0.872713
0.840444 + 0.235120i	0.872713
0.647493 - 0.549299i	0.849103
0.647493 + 0.549299i	0.849103

-0.249642 - 0.540740i	0.595585
-0.249642 + 0.540740i	0.595585
No root lies outside the unit circle.	
VAR satisfies the stability condition.	

Sumber: Data diolah

E. Uji Granger Causality

Uji kausalitas Granger digunakan untuk melihat arah hubungan suatu variabel dengan variabel yang lain dengan cara melihat nilai historisnya serta untuk mengetahui hubungan antar variabel merupakan hubungan searah atau dua arah. Hasil uji Granger dengan tingkat $\alpha=5\%$ adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Kausalitas Granger

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(PERTUMBUHAN) does not Granger Cause D(INFLASI)	25	1.11524	0.3963
D(INFLASI) does not Granger Cause D(PERTUMBUHAN)		0.89596	0.5102
D(PENGANGGURAN) does not Granger Cause D(INFLASI)	25	18.8240	9.E-06
D(INFLASI) does not Granger Cause D(PENGANGGURAN)		0.09145	0.9923
D(PENGANGGURAN) does not Granger Cause D(PERTUMBUHAN)	25	12.7907	8.E-05
D(PERTUMBUHAN) does not Granger Cause D(PENGANGGURAN)		0.30743	0.9003

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil uji Granger antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran disebutkan bahwa dalam persamaan pertama antara pertumbuhan dan inflasi tidak terjadi hubungan dua arah. Pada persamaan kedua antara tingkat pengangguran dan inflasi terjadi hubungan searah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi nilai inflasi sedangkan perubahan nilai inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Pada persamaan ketiga disebutkan bahwa tingkat pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebaliknya kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat pengangguran.

V. PENUTUP

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas telah ditemukan bahwa di Indonesia, hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran bukan lagi sebuah *tradeoff* melainkan berjalan searah, artinya inflasi yang tinggi juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Inflasi sebagai bentuk kenaikan harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari dan berakibat perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Sementara itu, sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sesuai dengan hukum Okun yaitu memiliki hubungan yang negatif, meskipun angka perbandingan yang dihasilkan tidak tepat bahwa setiap penurunan tingkat pertumbuhan 2% akan diikuti kenaikan pengangguran 1%.

Berdasarkan hasil uji Granger antara inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran disebutkan bahwa antara pertumbuhan dan inflasi tidak terjadi hubungan dua arah. Sementara itu antara tingkat pengangguran dan inflasi terjadi hubungan searah, dimana tingkat pengangguran mempengaruhi nilai inflasi sedangkan perubahan nilai inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran. Pada hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya, kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosadi, Dedi. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan E-views*. Andi. Yogyakarta.
- Praseto, Eko. 2009. *Fundamental Makroekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.
- Blanchard, Olivier. 2009. *Macroeconomics*. Pearson Prentice Hall. United States of America.
- Prachowny, Martin. 1993. Okun's Law: Theoretical Foundations and Revised Estimates. *Review of Economics and Statistics*, 75, 331–36
- Abel, Andrew B., dan Ben Bernanke. 2005. *Macroeconomics*. Pearson/Addison Wesley. USA
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, dan Richard Startz. 2008. *Makroekonomi*. McGraw-Hill. Americas, New York.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill. New York.
- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Undip. Semarang.
- Rizki, Perdana Kranti. 2012. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Pengangguran (Studi Kasus Kota Kabupaten se-Jawa Timur Tahun 2006-2010). *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Amir, Amri, Prof. Dr. *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia*. Universitas Jambi.
- Nota Keuangan dan UU APBN 2011-2015